

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengolahan data harga kebutuhan pokok dan barang penting pada periode Juli-September 2025 melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar), secara umum perkembangan harga pangan di Kota Banjar pada Triwulan III 2025 masih menunjukkan fluktuasi, meskipun pada akhir periode mulai terlihat upaya stabilisasi pada beberapa komoditas strategis. Adapun berdasarkan hasil pantauan di Pasar Banjar ditemukan data harga komoditas sebagai berikut:

No	Komoditas	Juli		Agustus		September		Perubahan
		M2	M4	M2	M4	M2	M4	
1	Beras Medium	Rp 12.700	Rp 12.800	Rp 12.800	Rp 12.800	Rp 12.500	Rp 12.000	-0,06
2	Beras Premium	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	0,00
3	Cabe Merah	Rp 35.000	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 60.000	0,71
4	Bawang Merah	Rp 45.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 36.000	Rp 36.000	Rp 35.000	-0,22
5	Daging Ayam Broiler	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 28.000	Rp 33.000	Rp 34.000	Rp 37.000	0,23
6	Telur Ayam Broiler	Rp 27.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 27.000	Rp 28.000	Rp 29.000	0,07
7	Daging Sapi	Rp 125.000	Rp125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	0,00
8	Gula Pasir Lokal	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	0,00
9	Bawang Putih	Rp 38.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 36.000	Rp 36.000	Rp 36.000	-0,05
10	Cabe Rawit Merah	Rp 70.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 38.000	Rp 46.000	-0,34
11	Minyak Goreng (Kemasan)	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	0,00
12	Minyak Goreng (Curah)	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 19.000	0,00
13	Mie Instan	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	0,00
14	Susu Bubuk	Rp 56.400	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700	-0,01
15	Ikan Kembung	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 47.000	Rp 47.000	Rp 47.000	Rp 47.000	-0,02
16	Tempe 1 Kg	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00
17	Tepung Terigu Segitiga Biru	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00
18	Udang	Rp 110.000	Rp110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	0,00
19	Tahu Mentah 1 Kg	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	0,00
20	Pisang 1 Kg	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	0,00
21	Susu Balita (SGM) 400Gr	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	0,00

22 Jeruk 1 Kg	Rp 20.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	Rp 20.000	0,00
---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Komoditas pangan yang bersifat sensitif terhadap cuaca, gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan ketergantungan pasokan dari luar daerah masih menjadi sumber utama volatilitas harga. Sementara itu, komoditas dengan rantai pasok relatif baik menunjukkan kestabilan harga yang cukup baik.

a. IPH Kota Banjar Triwulan III 2025

Secara keseluruhan, perkembangan IPH Triwulan III 2025 menunjukkan pola fluktuatif yang cukup jelas, dengan tekanan harga yang relatif terkendali pada Juli, diikuti fase deflasi pada Agustus, dan kemudian mengalami peningkatan signifikan pada September. Pola ini mencerminkan dinamika penyesuaian pasokan dan permintaan yang dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat menjelang akhir triwulan.

◦ Juli 2025

Pada Juli 2025, IPH Kota Banjar berada pada zona positif dengan kisaran nilai antara 0,68 hingga 1,10. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan kenaikan harga yang relatif moderat dan stabil. Perkembangan tersebut mencerminkan mulai meningkatnya permintaan masyarakat pasca periode penyesuaian pada Triwulan II, seiring dengan relatif terjaganya pasokan komoditas pangan utama. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa mekanisme pasar pada Juli masih berjalan cukup seimbang.

◦ Agustus 2025

Memasuki Agustus 2025, IPH mengalami koreksi signifikan dan berada pada zona negatif, dengan nilai berkisar antara -1,53 hingga -1,78. Penurunan ini mengindikasikan terjadinya deflasi yang cukup dalam, terutama dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dari masa panen serta melemahnya permintaan pada beberapa komoditas strategis. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas stabilisasi pasokan, namun di sisi lain juga berpotensi menekan pendapatan produsen dan petani.

◦ September 2025

Pada September 2025, IPH kembali bergerak positif dengan penguatan yang cukup tajam, berada pada kisaran 1,01 hingga 2,76. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya tekanan harga seiring dengan mulai berkurangnya pasokan pada sejumlah komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta penguatan permintaan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya fase rebound pasca deflasi Agustus, yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang berlebihan.

b. Komoditas dengan Kenaikan Harga Signifikan

◦ Cabe Merah.

Harga cabe merah meningkat dari Rp35.000/kg (Juli M2) menjadi Rp60.000/kg (September M4). Kenaikan ini mencerminkan tekanan pasokan yang kuat akibat faktor cuaca, gangguan OPT, serta keterbatasan pasokan lokal.

Daging Ayam Broiler

Harga daging ayam broiler naik dari Rp30.000/kg (Juli M2) menjadi Rp37.000/kg (September M4). Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan penyesuaian biaya produksi.

- **Telur Ayam Broiler**

Harga telur ayam broiler meningkat dari Rp27.000/kg (Juli M2) menjadi Rp29.000/kg (September M4). Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan dari sisi biaya pakan dan permintaan.

c. Komoditas dengan Harga Relatif Stabil

- **Beras Premium**

Harga stabil di Rp16.000/kg sepanjang Juli-September 2025, mencerminkan pasokan yang terjaga dan distribusi yang lancar.

- **Minyak Goreng (Kemasan)**

Harga tetap pada level Rp17.000/liter selama Triwulan III, didukung oleh kebijakan stabilisasi dan ketersediaan stok.

- **Daging Sapi**

Harga bertahan di Rp125.000/kg tanpa perubahan signifikan, menunjukkan stabilitas pasokan dan permintaan.

d. Komoditas dengan Penurunan Harga

- **Cabe Rawit Merah**

Harga turun dari Rp70.000/kg (Juli M2) menjadi Rp46.000/kg (September M4). Penurunan dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dan normalisasi distribusi.

- **Bawang Merah**

Harga menurun dari Rp45.000/kg (Juli M2) menjadi Rp35.000/kg (September M4), seiring membaiknya produksi dan distribusi.

- **Bawang Putih**

Harga turun dari Rp38.000/kg (Juli M2) menjadi Rp36.000/kg (September M4), dipengaruhi oleh pasokan impor dan distribusi yang relatif lancar.

e. Tren Bulanan

Pada bulan Juli 2025, harga sebagian besar komoditas relatif stabil, meskipun mulai terlihat kenaikan pada beberapa komoditas hortikultura seperti cabe merah dan bawang merah. Komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng masih berada pada level yang terkendali, mencerminkan keseimbangan awal antara pasokan dan permintaan.

Memasuki bulan Agustus 2025, volatilitas harga meningkat, terutama pada komoditas hortikultura. Kenaikan harga terjadi pada cabe merah dan daging ayam broiler, sementara beberapa komoditas lain seperti bawang merah dan cabe rawit merah mulai mengalami koreksi seiring membaiknya pasokan dan distribusi.

◦

Pada bulan September 2025, tekanan harga kembali meningkat pada sejumlah komoditas, khususnya cabe merah dan daging ayam broiler. Sebaliknya, harga beras medium menunjukkan tren penurunan seiring masuknya masa panen dan adanya intervensi pasar. Secara umum, fluktuasi harga pada Triwulan III masih didominasi oleh komoditas hortikultura yang sensitif terhadap faktor cuaca dan pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Perkembangan harga komoditas pangan di Kota Banjar dalam beberapa periode terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, khususnya pada komoditas strategis seperti beras medium, daging ayam broiler, telur ayam, cabai merah, cabai rawit merah, serta bawang merah dan bawang putih. Pergerakan harga yang tidak stabil tersebut mencerminkan masih adanya **tekanan struktural dalam sistem pasokan dan distribusi pangan daerah**. Fluktuasi harga yang terjadi tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi indikator bahwa mekanisme pengendalian harga di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan.
- Dari sisi hulu, **faktor cuaca yang tidak menentu serta gangguan organisme pengganggu tanaman** masih menjadi kendala utama dalam menjaga kesinambungan produksi, terutama pada komoditas hortikultura. Penurunan produktivitas akibat curah hujan tinggi, perubahan pola musim, maupun serangan hama berdampak langsung pada berkurangnya pasokan di tingkat pasar. Kondisi ini menyebabkan harga mudah mengalami kenaikan dalam waktu singkat, khususnya ketika permintaan masyarakat berada pada level yang relatif tinggi.
- **Keterbatasan kapasitas produksi lokal** tersebut semakin diperkuat oleh **tingginya ketergantungan** Kota Banjar terhadap pasokan dari daerah lain. Dalam kondisi normal, pola ini masih dapat menopang kebutuhan masyarakat. Namun, ketika terjadi gangguan produksi, kenaikan biaya transportasi, atau hambatan distribusi di wilayah pemasok, dampaknya secara langsung dirasakan oleh konsumen di Kota Banjar. Situasi ini menempatkan daerah pada posisi sebagai penerima harga (price taker), dengan ruang pengendalian yang relatif terbatas.
- Di sisi lain, **karakteristik komoditas pangan segar yang mudah rusak, sangat bergantung pada musim**, serta memiliki elastisitas pasokan yang rendah menyebabkan volatilitas harga menjadi semakin tinggi. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pengolahan pascapanen turut mempersempit ruang stabilisasi harga. Dalam kondisi tersebut, intervensi pasar yang bersifat sementara seringkali hanya mampu meredam gejolak dalam jangka pendek, tanpa mampu membangun ketahanan harga yang berkelanjutan.
- Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh **keterbatasan intervensi struktural dan koordinasi lintas sektor**. Program pengendalian harga yang berjalan saat ini sudah relatif baik menjawab permasalahan, namun masih didominasi oleh langkah-langkah jangka pendek, sementara upaya penguatan produksi lokal, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta pengelolaan data harga dan pasokan secara terpadu belum optimal. Selain itu, **keterbatasan anggaran daerah** yang berlanjut ini masih menjadi permasalahan yang turut membatasi ruang gerak dalam memperluas cakupan program stabilisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan.
- Lebih lanjut, **jalur distribusi pasokan yang belum sepenuhnya optimal** juga menjadi faktor yang memperbesar risiko gejolak harga. Keterbatasan infrastruktur

logistik, ketergantungan pada jalur distribusi tertentu, serta belum meratanya akses transportasi menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi dan mudah terpengaruh oleh gangguan eksternal. Kondisi ini pada akhirnya ikut mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

- Dengan demikian, dinamika harga pangan di Kota Banjar merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari produksi, distribusi, biaya input, hingga kapasitas kelembagaan dan fiskal daerah. Kompleksitas permasalahan tersebut menegaskan perlunya pendekatan pengendalian harga yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka menengah-panjang, sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kota Banjar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan strategis yang mencakup aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif, antara lain:

a. Keterjangkauan Harga

- Sebagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Selasa Pasar Hasil Tani pada tanggal 17 Juli, 9, 12, 14, dan 30 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi dengan mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung, sehingga harga yang diterima masyarakat lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
- Selain itu, Operasi Pasar Murah (OPM) dilaksanakan pada 24 September 2025 sebagai upaya menekan harga komoditas tertentu yang mengalami kenaikan serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

b. Ketersediaan Pasokan

- Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kota Banjar terus mengembangkan Program Pakarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga.
- Selain itu, dilakukan Penanaman Jagung Serentak di Desa Cibeureum bersama Forkopimda Kota Banjar pada 14 Juli, 4 Agustus, 23 dan 27 September 2025. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pasokan.
- Sebagai puncak kegiatan produksi, Panen Raya Padi dan Jagung Serentak dilaksanakan pada 27 September 2025, yang berkontribusi positif terhadap ketersediaan pasokan dan membantu meredam tekanan harga pada akhir triwulan.

c. Kelancaran Distribusi

- Pada Tw III 2025, **dilanjutkan** perbaikan infrastruktur jalan di Jalan Lili Kusuma dan Jalan Rejasari sepanjang 40,059 km sebagai upaya memperlancar distribusi barang dan pangan. Tercovered sebesar 30km.
- Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.

d. Komunikasi Efektif

- Pada Triwulan III Tahun 2025, Pemerintah Kota Banjar secara aktif menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 22 Juli, 11 Agustus, dan 08 September 2025.
- Untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan Sidak Pasar pada 7 dan 30 Juli, 4 dan 29 Agustus, serta 5 dan 29 September 2025. Sidak pasar dilakukan guna memantau ketersediaan stok, stabilitas harga, serta keamanan pangan yang beredar di pasar tradisional.
- **Penerbitan SK Wali Kota Banjar tentang Penerima Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)**, sesuai arahan Wali Kota dalam HLM TPID 11 Agustus 2025
- **Penerbitan SK Wali Kota Banjar Nomor 230 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber** sesuai arahan Wali Kota dalam HLM TPID 11 Agustus 2025
- Dalam rangka menjaga transparansi dan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat, Pemerintah Kota Banjar secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Laporan harga pangan dilakukan setiap hari melalui SiLinda Jabar, Simawas Pagi, dan SP2KP.
- Harga pangan harian juga dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota Banjar, media sosial Dinas KUKMP, serta papan informasi harga di Alun-Alun Kota Banjar, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi harga secara mudah dan akurat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 telah menunjukkan hasil positif, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Keterjangkauan Harga (K1), intervensi pasar seperti GPM, Selasa Pasar Hasil Tani, dan OPM terbukti mampu menahan lonjakan harga dalam jangka pendek. Namun, dampaknya terhadap harga pasar secara keseluruhan masih terbatas karena frekuensi dan cakupan pelaksanaan yang belum optimal.
2. Ketersediaan Pasokan (K2), program PAKAYA-P2L dan penanaman jagung serentak merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap stabilisasi harga di tingkat kota masih memerlukan waktu dan penguatan skala implementasi. Perlu Bekerja sama dengan daerah penghasil agar dapat menutupi stok bahan pangan yang cenderung stoknya sedikit di triwulan III Kota Banjar.
3. Kelancaran Distribusi (K3), sidak pasar efektif dalam menjaga ketersediaan dan keamanan pangan, namun belum sepenuhnya mampu menekan volatilitas harga komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi faktor eksternal.
4. Komunikasi Efektif (K4), publikasi harga harian dan koordinasi lintas instansi telah meningkatkan transparansi informasi dan membantu mengelola ekspektasi inflasi masyarakat, lebih peka dengan data yang ada di lapangan, meskipun integrasi data lintas OPD masih perlu disempurnakan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjar pada Triwulan III Tahun 2025, Tim Pengendali Inflasi Daerah merekomendasikan beberapa langkah kebijakan strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatkan intensitas dan perluasan sasaran intervensi pasar** melalui Gerakan Pangan Murah, Selasa Pasar Hasil Tani, dan Operasi Pasar Murah, khususnya pada komoditas hortikultura yang memiliki tingkat volatilitas tinggi seperti cabe merah dan cabe rawit merah, agar dampak stabilisasi harga dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.
2. **Memperkuat program Pakarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L)** sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan berbasis rumah tangga dengan meningkatkan pendampingan teknis, penyediaan sarana produksi, serta penguatan kelompok masyarakat penerima manfaat sehingga kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan pangan lokal semakin signifikan.
3. **Mendorong penguatan kerjasama antar daerah (KAD)** dengan wilayah sentra produksi pangan strategis, terutama komoditas hortikultura, guna menjamin keberlanjutan pasokan dan mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme pasar yang fluktuatif.
4. **Mengembangkan pola tanam dan kalender produksi berbasis data cuaca dan kebutuhan pasar**, khususnya untuk komoditas rawan inflasi, sehingga pasokan dapat lebih merata sepanjang tahun dan risiko lonjakan harga musiman dapat ditekan.
5. **Meningkatkan efektivitas pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)** melalui intensifikasi gerakan pengendalian terpadu, penguatan peran penyuluh pertanian, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, guna menjaga produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
6. **Memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini (early warning system)** inflasi daerah dengan memanfaatkan tren perubahan harga harian dan mingguan, sehingga TPID dapat mengambil langkah antisipatif sebelum terjadi lonjakan harga yang signifikan.
7. **Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data harga lintas OPD** melalui pemanfaatan sistem informasi yang telah ada, sehingga tercipta satu data harga resmi TPID yang akurat, konsisten, dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
8. **Mengoptimalkan peran komunikasi publik dalam pengendalian inflasi**, antara lain melalui publikasi harga secara rutin dan edukasi masyarakat terkait pola konsumsi bijak, agar ekspektasi inflasi dapat dikelola dengan baik dan tidak memicu kepanikan pasar.
9. **Mendorong penguatan cadangan pangan daerah**, khususnya untuk komoditas strategis, sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga dalam menghadapi kondisi darurat atau periode rawan inflasi.
10. **Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi**, baik antar perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal, BUMD, dan pelaku usaha, sehingga kebijakan yang diambil bersifat komprehensif dan saling mendukung.
11. **Mengintegrasikan program pengendalian inflasi dengan upaya perlindungan sosial**, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, agar dampak kenaikan harga pangan tidak menurunkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
12. **Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian inflasi**, termasuk pengukuran dampak intervensi pasar terhadap pergerakan harga, sebagai

dasar perbaikan kebijakan pada periode selanjutnya.